*Journal of Sharia Accounting and Tax*
*Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 111−123*
*Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

# Sistem Akuntansi Instansi dalam Pengelolaan Aset Negara dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Kantor Imigrasi Kelas I Cirebon

**Hilda Fitriani[1,*], Sri Rokhlinasari[1], Mohammad Iqbal[2]**

[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*
[2]*Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

**KATA KUNCI**

sistem akuntansi instansi;
laporan keuangan berbasis akrual;
SIMAK-BMN;
SAIBA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset negara kurang sesuai dengan PSAP No. 07 karena terdapat aset tetap ekstrakomptabel yang tidak dimasukkan ke SIMAK-BMN. Dari segi kualitas sistem, SIMAK-BMN dapat menunjang pengelolaan aset negara. Dari segi SDM, masih terdapat kesalahan pemilihan kode barang. Dari segi kualitas laporan yang dihasilkan, terdapat pengakuan aset tetap yang tidak sesuai. Penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP No. 01 sudah sesuai. Dari segi kualitas sistem, SAIBA dapat membantu penyajian laporan keuangan. Dari segi SDM, operator SAIBA dapat menjalankan SAIBA dengan baik. Dari segi kualitas laporan yang dihasilkan, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

***KEYWORDS***

*government accounting system;*
*accrual-based financial reports*;
SIMAK-BMN;
SAIBA

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the application of the government accounting system in managing state assets and presenting accrual-based financial reports at the Class I Immigration Office TPI Cirebon. This study uses qualitative research. Data was collected through interviews, observation, documentation, and literature study. Data were analyzed using descriptive method. The results of the study show that the application of SIMAK-BMN in managing state assets is not in accordance with PSAP No. 07 because there are extracompatable fixed assets that are not included in SIMAK-BMN. In terms of system quality, SIMAK-BMN can support the management of state assets. In terms of human resources, there are still errors in selecting the item code. In terms of the quality of the reports produced, there is an inappropriate recognition of fixed assets. Application of SAIBA in presenting financial statements based on PSAP No. 01 is suitable. In terms of system quality, SAIBA can help present financial reports. In terms of human resources, SAIBA operators can run SAIBA well. In terms of the quality of the reports produced, in accordance with PP No. 71 of 2010.*

*Received* : *6 April 2023*
*Revised* : *9 May 2023*
*Accepted* : *8 June 2023*

*Correspondence to:
hildaafitriani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Oktavia et al., 2021). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengubah sistem akuntansi pemerintahan dari basis kas menjadi berbasis akrual. Perubahan ini juga bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjadi landasan hukum penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP tersebut menjadi panduan atas laporan keuangan berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sistem informasi berbasis akrual menggambarkan neraca dan menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk menilai kinerja keuangan (Nurlaila dan Susilo, 2021).

SAP berbasis akrual menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang mana penerapannya berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Desipradani & Rusmawati, 2017). Keberadaan sistem informasi tersebut membantu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak eksternal dan laporan internal yang diperlukan oleh entitas. Informasi yang dihasilkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Mardi, 2014).

Desipradani & Rusmawati (2017) berpendapat bahwa keberhasilan penerapan akuntansi basis akrual dapat dilihat pada faktor satuan kerja, mulai dari faktor sumber daya manusia (tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, latar belakang pendidikan pimpinan), faktor organisasional (kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan), dan faktor situasional lainnya (pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut). Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi satuan kerja dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Resistensi pegawai, kurangnya sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana penunjang, serta aspek budaya organisasi dan lingkungan menjadi kendala dan hambatan yang muncul saat proses transisi dari berbasis kas ke berbasis akrual. Sartika (2019) menyebutkan bahwa pada aspek komunikasi, yaitu sosialisasi tidak berfokus pada pemahaman SAP (hanya fokus pada penggunaan aplikasi) sehingga pegawai kurang memahami basis akrual. Lasabuda et al., (2020) memaparkan bahwa BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan basis akrual telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tetapi terdapat kendala, yaitu kurangnya tenaga ahli akuntansi dan sistem informasi yang terkadang mengalami kesalahan/kendala.

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Kantor Pemerintah berbasis akrual terdiri dari 2 (dua), yaitu Sistem Akuntansi Aset dan Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan. Unit Akuntansi Barang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara /lembaga (Intan & Putra, 2017). Penyusunan laporan keuangan tingkat satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yakni terdapat Sistem Informasi Manajamen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

SIMAK-BMN merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 terdapat beberapa kendala yaitu awalnya Operator SIMAK-BMN dan SAIBA kurang memahami dalam

penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual, cara penggunaan sistem aplikasi baru dan selalu melakukan pembaruan/pembaruan (SIMAKBMN dan SAIBA), serta terdapat perbedaan hasil dari rekonsiliasi akibat penggunaan basis akrual.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2015 sampai tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, agar dapat mempertahankan opini tersebut, satuan kerja yang berada di bawah unit Kementerian hukum dan HAM harus bekerja dengan lebih baik lagi untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam penerapan aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan pelaporan keuangan dari segi kualitas sistem, sumber daya manusia, dan kualitas laporan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

## TINJAUAN PUSTAKA

Studi mengenai penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual bukanlah suatu hal yang baru. Berikut beberapa studi terkait sistem akuntansi instansi: *pertama*, Intan & Putra (2017) meneliti "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset Negara dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terhadap PP No. 71 Tahun 2010 Pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang". Hasil studi menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang telah sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan asset, penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meski menghadapi kendala proses penyamaan data antara pengelola asset dan pengelola keuangan. Kendala tersebut tidak menghambat penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah yang telah ditentukan.

*Kedua*, Wiryaningsih et al., (2017) dalam jurnal "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli". Dalam penelitiannya, SDM yang memiliki pemahaman penerapan PP No. 71 Tahun 2010 menjadi aspek penunjang yang penting dalam mengaplikasikan sistem informasi akuntansi agar mencapai basis akrual penuh. Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli belum optimal dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara penuh dikarenakan kurangnya pemahaman SDM terhadap PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP Basis akrual dan belum mampu menerapkan sistem yang ada.

*Ketiga*, Sartika (2019) mengenai "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa". Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyajikan laporan keuangan belum menerapkan secara menyeluruh PP Nomor 71 Tahun 2010 karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan PP No. 71 tahun 2010, seperti tidak terjadinya transaksi investasi dan dana cadangan, pencatatan akun persediaan, serta tidak adanya keterangan terkait pengakuan aset lancar, transaksi beban hibah, serta saldo ekuitas di neraca harus sesuai dengan saldo akhir ekuitas pada LPE.

*Keempat*, Lasabuda et al., (2020) tentang "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Hasil studi menyebutkan bahwa BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan SAP Basis Akrual dalam penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meskipun masih 80% dengan kendala, seperti kurang memadainya SDM, sistem informasi, kurangnya tenaga ahli akuntansi dan aplikasi untuk menunjang sistem tersebut terkadang mengalami kendala.

*Kelima*, studi yang dilakukan Wirananda (2020) mengenai "Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Pelaksanaan SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan prosedur SIMAK-BMN tingkat UAKPB menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Namun, dalam proses penginputan harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan barang dikarenakan banyaknya kode dan nilai harga barang yang ada dalam sistem.

*Keenam*, penelitian Wirananda & Kindangen (2021) mengenai "Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara". Hasilnya adalah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan aspek kepuasan pengguna, aplikasi SIMAK-BMN sudah dapat dikatakan optimal karena dari segi kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan manfaat penggunaan. Operator sangat terbantu dalam menatausaha dan mendokumentasikan BMN melalui aplikasi terkomputerisasi dan integrasi antar sistem informasi. Pengendalian internal melalui penerapan aplikasi SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat dikatakan belum optimal karena masih terjadinya kehilangan barang dan dokumen pendukung barang. Kualitas informasi yang dihasilkan aplikasi SIMAK-BMN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, belum sepenuhnya optimal berdasarkan Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Ketujuh*, Oktavia et al., (2021) melakukan studi "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dibadan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini memaparkan bahwa laporan keuangan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah diterapkan sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan juga masih menerapkan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual. Perlakuan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 terkait penerapan PP No 71 Tahun 2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca.

Berdasarkan berbagai studi yang telah dipaparkan, belum ditemukan tinjauan komprehensif terkait sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk meninjau lebih dalam fenomena tersebut, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menggambarkan penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jawa Barat. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan, antara lain Bapak Yogi Trengginas Wicaksono (Operator SAIBA), Bapak Ahmad Nurhabibi (Operator SIMAK-BMN), dan Bapak Erry Soffan Hernanto (Bendahara Pengeluaran). Selain itu, laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menjadi data sekunder. Analisis deskriptif digunakan pada penelitian ini. Proses analisis data menggunakan tiga alur yaitu:

1. Reduksi data, yaitu merangkum data yang kompleks dan rumit, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, yaitu menggabungkan informasi secara tersusun kedalam suatu bentuk yang mudah dimengerti.
3. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam Pengelolaan Aset Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Dalam pengelolaan aset negara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN. Berikut ini analisis lebih lanjut mengenai penerapan SIMAK-BMN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dari kesesuaian dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, kualitas sistem, kemampuan sumber daya manusia, dan laporan yang dihasilkan.

### 1. Kesesuaian penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap

Laporan yang dihasilkan oleh SIMAK-BMN tetap harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.**
**Hasil Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon**

| No. | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap | Penerapan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon | PSAP No. 07 | Kesesuaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengakuan Aset Tetap | Pengakuan aset tetap sesuai kriteria PSAP No. 07, akan tetapi terdapat aset yang memenuhi kriteria aset tetap dan diinput ke aplikasi Persediaan | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. | Kurang sesuai |
| 2 | Penilaian Aset Tetap | Penilaian menggunakan biaya perolehan | Penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Jika penilaian aset | Sesuai |

| No. | Perlakuan Akuntansi Aset Tetap | Penerapan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon | PSAP No. 07 | Kesesuaian |
|---|---|---|---|---|
| | | yaitu menyangkut seluruh biaya yang terjadi ketika pembelian aset tetap. | tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. | |
| 3 | Pengukuran Aset Tetap | Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. | Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masingmasing akun aset tetap dan akun ekuitas. | Sesuai |
| 4 | Pengungkapan Aset Tetap | Mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau nilai buku, rekonsiliasi jumlah tercatat, serta informasi penyusutan. Untuk metode penyusutan yang digunakan yaitu garis lurus. | Mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. | Sesuai |

## 2. Kualitas sistem SIMAK-BMN

SIMAK-BMN merupakan aplikasi berbasis komputer yang dikhususkan menggunakan 1 (satu) komputer operator SIMAK-BMN. Hal ini bertujuan untuk keamanan sistem dan meminimalisir kesalahan data yang telah diinput. Permana (2016) menyatakan bahwa hanya pegawai yang mempunyai otorisasi khusus yang dapat menjalankan aplikasi ini sehingga tingkat keamanan data cukup tinggi. Penggunaan SIMAK-BMN ini membantu penginputan data sehingga tepat waktu untuk kemudian dilakukan proses pengiriman ADK ke SAIBA. Lebih lanjut, SIMAK-BMN membuat proses perekaman dan pelaporan lebih cepat dan mudah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan keputusan saat dibutuhkan.

Wirananda dan Kindangen (2021) menjelaskan bahwa operator SIMAK-BMN perlu waktu untuk mempelajari dan memahami pengoperasian setiap menu beserta fungsinya pada SIMAK-BMN ini. Aplikasi ini membutuhkan pembaruan informasi

yang berasal dari situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pembaharuan aplikasi ini biasanya bersamaan dengan aplikasi persediaan, yang dilakukan sesuai instruksi koordinator wilayah. Permana (2016) menyebutkan pembaruan aplikasi diperlukan dalam meningkatkan kualitas sistem dan memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi. Aplikasi SIMAK-BMN ini mengacu pada proses bisnis kegiatan instansi atau satuan kerja sehingga fitur menu disesuaikan dengan kebutuhan.

**3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan SIMAK-BMN**

Operator SIMAK-BMN di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dioperasikan oleh satu pegawai yang sekaligus mengelola persediaan barang habis pakai dengan aplikasi Persediaan 2021. Berdasarkan wawancara dengan operator SIMAK-BMN, SDM tambahan dibutuhkan untuk mengelola aset negara, persediaan dan pengoperasian aplikasi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya persediaan dan aset milik negara yang perlu dikelola dan diinventarisasi. Jika hanya satu operator, maka dapat terjadi rentan kekeliruan dan kewalahan. Operator perlu menginput data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat terhindar dari kekeliruan (Wirananda, 2020).

Latar belakang pendidikan operator SIMAK-BMN merupakan sarjana sosial, bukan dari bidang akuntansi ataupun ekonomi, dan belum pernah ditugaskan dalam inventarisasi aset serta tidak adanya pelatihan mengenai SIMAK-BMN. Kondisi tersebut akan berdampak pada efektivitas pengoperasian aplikasi. Satiari dan Yadnyana (2020) menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, serta pengalaman membantu operator dalam meningkatkan efektivitas pengoperasian SIMAK-BMN.

Sementara itu, pengelolaan BMN dalam SIMAK-BMN akan direkonsiliasi dengan SAIBA. Operator berperan sangat penting dalam menjalankan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi persediaan. Oleh karena itu, perlu SDM yang secara kuantitas dan kualitas dapat membantu dalam mengelola aset negara dan persediaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIMAK-BMN, pemilihan kode barang dan penetapan status kondisi barang merupakan tingkat kesalahan yang paling sering terjadi. Kesalahan penetapan status kondisi barang disebabkan operator SIMAK-BMN keliru dalam pemilihan Nomor Urut Pendaftaran. Kondisi ini menyebabkan kurang akuntabelnya kualitas laporan BMN. Jika pengguna kurang cakap dalam pengoperasian aplikasi, maka hasil laporan juga kurang efektif. Kasfari dan Abdullah (2019) menyebutkan bahwa implementasi basis akrual di Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh belum efektif karena kesiapan SDM (minimnya staf yang berlatang belakang pendidikan akuntansi).

**4. Kualitas laporan yang dihasilkan SIMAK-BMN**

Fauziah (2018) menjelaskan bahwa kualitas laporan atau informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMAK-BMN dapat ditinjau dari 4 (empat) karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar suatu laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan memenuhi kualitas yang dikehendaki sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, antara lain:

**a. Relevan**

SIMAK-BMN dapat dikatakan relevan, karena informasi yang termuat dalam neraca BMN dapat memengaruhi keputusan dalam laporan keuangan. Kehadiran SIMAK-BMN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Semua pekerjaan terselesaikan tepat waktu. Informasi yang dihasilkan oleh SIMAK-BMN dapat meramal hasil yang akan datang berdasarkan

hasil masa lalu, seperti kemungkinan barang rusak atau penyusutan sehingga dapat mempersiapkan untuk pengajuan barang.

**b. Andal**

Informasi yang dihasilkan dari SIMAK-BMN, yaitu neraca BMN berdasarkan daftar Barang Milik Negara dan nilai-nilai dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penyajian menghasilkan informasi yang jujur, dapat diverifikasi dan dapat diuji kembali. Dokumen pendukung harus sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh bendahara dan bisa diverifikasi saat rekonsiliasi dengan SAIBA. Terdapat pengakuan aset tetap yang tidak sesuai dengan PSAP No. 01 sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan.

**c. Dapat dibandingkan**

Laporan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satu perbandingannya adalah dari nominal aset negara karena adanya penyusutan. Nominal aset negara bisa dibandingkan dan penyusutan dilakukan berdasarkan sistem aplikasi.

**d. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan BMN dapat dipahami oleh pengguna dan dapat disesuaikan dengan batasan pemahaman pengguna. Operator SIMAK-BMN di kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai SIMAK-BMN. Operator tersebut belum mengikuti pelatihan khusus untuk aplikasi SIMAK-BMN sehingga para operator masih mempelajari informasi yang dimaksud.

## Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon diterapkan sejak tahun 2015. Sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian, seperti komputer, meja kerja, kursi, printer, dan lainnya. Berikut ini analisis lebih lanjut mengenai penerapan SAIBA pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dari kesesuaian dengan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan, kualitas sistem, kemampuan sumber daya manusia, dan kualitas laporan yang dihasilkan.

### 1. Kesesuaian Penerapan PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Saat ini, pemanfaatan Aplikasi SAIBA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan. Namun, karena Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon ini adalah Instansi Non-BLU (Badan Layanan Umum), Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak ada. Satker tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya melakukan anggaran belanja yang diajukan ke KPPN setelah proses pembuatan SPM sesuai dengan kebutuhan belanja Satker selama tahun anggaran berjalan.

Pada laporan realisasi anggaran, terdapat pos pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasinya. Realisasi anggaran tahun 2021 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan,belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing

anggarannya. Realisasi anggaran tahun 2021 tidak sepenuhnya sesuai degan yang dianggarkan.

Neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA dan telah sesuai SAP yang berlaku. Sementara itu, aplikasi SAIBA tidak mengeluarkan CaLK karena CaLK sendiri diproses dengan Microsoft Word dengan acuan laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh SAIBA. Lalu, CaLK digabung dengan laporan yang dikeluarkan SAIBA sehingga menjadi satu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian laporan keuangan harus berdasarkan standar yang berlaku, yaitu PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Berikut ini hasil analisis penerapan SAP berbasis akrual di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon:

**Tabel 2.**
**Hasil Analisis Penerapan PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon**

| No. | Basis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon | PP No. 71 Tahun 2010 | Kesesuaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran | Menyajikan pendapatan negara dan hibah, belanja, serta pembiayaan. | Menyajikan pendapatan, pada anggaran dan belanja, transfer dan pembiayaan. | Sesuai |
| 2 | Neraca | Posisi keuangan meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Terdapat juga kewajiban jangka pendek dan ekuitas. | Menjelaskan posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas secara lengkap. | Sesuai |
| 3 | Laporan Operasional | Menyajikan pos pendapatan operasional, pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan hibah, beban operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. | Menyajikan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional jika ada, pos luar biasa jika ada, serta surplus/defisit-LO. | Sesuai |
| 4 | Laporan Perubahan Ekuitas | Menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi, koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, kenaikan/penurunan ekuitas, dan ekuitas akhir. | Menjelaskan lengkap pos pos ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi dan ekuitas akhir yang diperoleh. | Sesuai |
| 5 | Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) | Menjelaskan rinci mengenai pos-pos yang disajikan. | Analisis daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE. | Sesuai |

**2. Kualitas sistem SAIBA**

SAIBA memiliki beragam fitur menu yang memudahkan operator dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Permana (2016) bahwa sistem informasi dapat memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Data realisasi anggaran, persediaan aset, pengembalian belanja maupun setoran PNBP Satker dapat dinput dalam satu waktu, sehingga laporan keuangan yang disajikan pun dapat dalam waktu cepat. Basis akrual lebih tepat dalam mencapai ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2016), yaitu aplikasi SAIBA membuat proses perekaman dan pelaporan menjadi lebih cepat dan mudah.

SAIBA dapat digunakan pada perangkat lain selain milik operator. Namun, Satker memiliki kebijakan untuk menggunakan SAIBA hanya pada perangkat yang digunakan operator sehingga terhindar dari kekeliruan data atau kesalahan sistem. Tidak terdapat kendala berarti yang berasal dari sistem aplikasi SAIBA. Operator perlu membarui informasi terkini yang bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu informasinya adalah pembaruan sistem aplikasi. Pembaruan tersebut dilakukan secara keseluruhan aplikasi yang terintegrasi (bukan hanya aplikasi SAIBA saja) dan dilakukan sesuai kebutuhan.

**3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan SAIBA**

Dalam memahami basis akrual, operator SAIBA mengalami kendala karena latar pendidikan tidak sesuai dengan tugas yang diampu. Para pegawai, khususnya satuan kerja di bagian keuangan, sangat sedikit yang latar belakang pendidikannya di bidang akuntansi/ekonomi. Bapak Yogi Trengginas Wicaksono, selaku operator SAIBA, merupakan sarjana hukum dan sebelumnya belum pernah memiliki tugas di bagian keuangan.

Studi yang dilakukan Wiryaningsih et al., (2017) menjelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual membutuhkan SDM yang memahami penerapan PP No. 71 tahun 2010 dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi yang digunakan di sebuah instansi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada operator. Para pegawai yang ditugaskan menjadi operator penyusun laporan keuangan juga harus memiliki kemauan kuat, agar dapat mandiri dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Operator sering kali mendapat pelatihan atau sosialisasi ketika ada pembaruan sistem. Sosialisasi dan bimtek ini berpengaruh terhadap kemampuan operator SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan sesuai implementasi PP No. 71 Tahun 2010. Nurlaila dan Susilo (2021) menyebutkan bahwa dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan kompetensi SDM sehingga dapat meminimalisir hambatan penerapan SAIBA.

**4. Kualitas Laporan yang Dihasilkan SAIBA**

**a. Relevan**

Laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah relevan karena memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif, tepat waktu, dan informasi keuangan disajikan dengan lengkap. Laporan keuangan yang dihasilkan SAIBA akurat, tepat waktu dan sistematis. SAIBA sangat membantu dalam proses perekaman, sangat memudahkan, dan membuat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisen.

**b. Andal**

Laporan keuangan dikatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memenuhi kriteria andal yaitu: (1) penyajian jujur setiap transaksi dibuktikan dengan berkas-berkas pertanggung jawaban, yaitu nota dinas, kuitansi, dokumentasi, faktur pajak, daftar kehadiran, dan laporan kegiatan; (2) dapat diverifikasi, yaitu SAIBA terintegrasi dengan E-Rekon & LK yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan Kementerian Keuangan dengan Satker sehingga laporan keuangan dapat diuji oleh auditor BPK.

**c. Dapat Dibandingkan**

Jika kebijakan atau peraturan yang sudah diterapkan saat ini tidak ada perubahan baru, maka laporan keuangan yang dikeluarkan Aplikasi SAIBA dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal termuat dalam CaLK yang menyebutkan tidak adanya perubahan pada entitas dan berlaku sama dari tahun ke tahun. Lain halnya dengan perbandingan eksternal yang dapat dilakukan ketika entitas yang diperbandingkan mempraktikkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sedang berjalan sekarang, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

**d. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Dengan demikian, pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, penerapan SIMAK-BMN dalam pengelolaan aset negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon berdasarkan kesesuaian dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap terdapat ketidaksesuaian dalam pengakuan aset tetap ekstrakomptabel yang tidak diinput ke SIMAK-BMN. Lalu, dari segi SDM dalam mengoperasikan SIMAK-BMN, terdapat kesalahan dalam pemilihan kode dan operator tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai serta tidak mendapatkan pelatihan secara berkala. Dari segi kualitas laporan yang dihasilkan, pengakuan aset tetap belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 sehingga dikategorikan kualitas laporan kurang andal. Sementara, dari segi kualitas sistem aplikasi SIMAK-BMN dapat menunjang dalam pengelolaan aset negara dari kemudahan fitur, ketepatan waktu, keamanan data, dan pembaruan aplikasi yang sesuai kebutuhan.

Penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon berdasarkan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan sudah sesuai. Dari segi kualitas sistem, SAIBA dapat membantu penyajian laporan keuangan dari kemudahan fitur, ketepatan waktu, keamanan data, dan pembaruan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Dari segi SDM, operator SAIBA dapat menjalankan SAIBA dengan baik karena mendapatkan bimtek dari KPPN meski memiliki latar belakang pendidikan

yang tidak sesuai dengan tugas yang diampu. Dari segi kualitas laporan yang dihasilkan, sudah memenuhi prasyarat normatif sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

Desipradani, G., & Rusmawati, Z. (2017). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP no. 71 tahun 2010 di pemkot Surabaya. *Majalah Ekonomi*, *22*(2), 137-144.

Fauziah, I. (2018). *SAP*: *Standar Akutansi Pemerintahan*. Ilmu Cemerlang Group.

Intan, I., & Putra, R. E. (2017). Penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan aset negara dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual terhadap PP No. 71 tahun 2010 pada Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang. *Measurement Jurnal Akuntansi*, *11*(2).

Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) pada balai diklat keagamaan provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *4*(2), 237-244.

Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(2), 167-174.

Mardi. (2014). Sistem Informasi Akuntansi (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.

Nurlaila, A., & Susilo, G. F. A. (2021). Evaluasi penggunaan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) di Pengadilan Negeri Mungkid. *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, *5*(3), 168-175.

Oktavia, K., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021). Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Badan Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *10*(08).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Permana, A. D. (2016). Penerapan aplikasi SAIBA untuk penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, *14*(1), 65-77.

Sartika, D. (2019). Analisis implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP no 71 tahun 2010 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Satiari, N. P. A. I., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengaruh karakteristik sumber daya manusia pada efektivitas SIMAK BMN. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(3).

Wirananda, I. G. A. S. (2020). Sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, *4*(2), 39-43.

Wirananda, I. G. A., & Kindangen, W. D. (2021). Evaluasi aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(3), 902-908.

Wiryaningsih, N. N. D., Sulindawati, N. L. G. E., & Prayudi, M. A. (2017). Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli. *JIMAT* (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*) *Undiksha*, *8*(2).